

Determinan Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2018 dalam Perspektif Ekonomi Islam

Desi Rahmiyanti

Universitas Muhammadiyah Kupang
desirahmianti@gmail.com

Yanuardi Wicaksono

Sekolah Tinggi Agama Islam Kupang
yanuardiwicaksono@gmail.com

Abstract

Poverty or the number of people living under the poverty line is a big issue being faced by most of developing countries including Indonesia. Poverty refers to a condition in which someone is not capable of fulfilling the primary needs. The percentage of population in East Nusa Tenggara is in the third highest rank after West Papua and Papua. The aim of this study is to observe the impacts of Gross Regional Domestic Product (GRDP), Human Development Index (HDI), population rate and Open Unemployment Rate on the poverty in regencies/cities in East Nusa Tenggara in 2011-2018 in the Islamic economic perspective. This is a quantitative research in which it used the sample in the form of secondary data related to GRDP per capita, HDI, population rate, and Open Unemployment Rate in 21 regencies/cities in East Nusa Tenggara in the period of 2011-2018. The data analysis method used was PVECM (Panel Vector Error Correction Model) to estimate the long-term and short-term impacts between the independent and dependent variables. The results of this study showed that GRDP in the short-term and long-term had a negative impact on the poverty. Meanwhile, HDI significantly had long-term negative impact and insignificant short-term positive impact and the population rate in both short-term and long term brought a significantly positive impact. Furthermore, Open Unemployment Rate in the long term brought a negative impact and in the short term it brought positive impact on poverty. Then, simultaneously, variables GRDP, HDI, population rate and Open Unemployment Rate both in a long term and in a short term brought a positive impact on the poverty with the long term probability values of statistic F of 0,000000 and the one in the short term of 0,001108.

Keywords: *Poverty, GRDP, HDI, Population Rate, Islamic Economic*

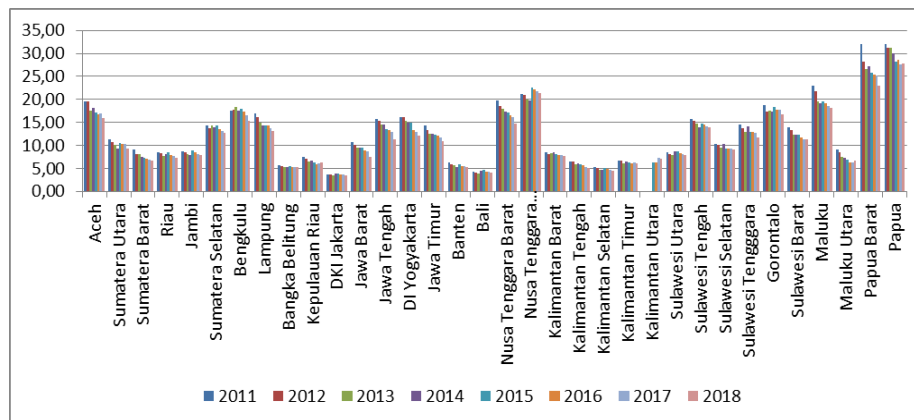
A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu ada di setiap negara, baik dalam bentuk kemiskinan yang sifatnya absolut maupun kemiskinan relatif. Masalah kemiskinan harus diupayakan penyelesaiannya, karena jika tidak mampu diselesaikan, maka akan jadi permasalahan yang dapat mengganggu aktivitas perekonomian. Al-Qardawi menjelaskan bahwa dalam pandangan Islam tidak dibenarkan seseorang hidup di

tengah masyarakat Islam sekalipun *ahl al-zimma* (warga negara non-muslim) menderita lapar, tidak berpakaian, menggelandang (tidak bertempat tinggal), dan ajaran Islam menyatakan perang terhadap kemiskinan dan berusaha keras untuk membendungnya serta mengawasi kemungkinan yang dapat menimbulkan kemiskinan. Hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan akidah, akhlak dan perbuatan, memelihara kehidupan rumah tangga, melindungi kestabilan serta ketentraman masyarakat (Naerul, 2017).

Berdasarkan isi dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK), bahwa pemerintah Indonesia menetapkan sembilan sektor kebijakan pembangunan dengan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama. Target penanggulangan kemiskinan adalah dengan langkah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dibidang kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi. Pemenuhan kebutuhan dasar merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam konteks pengembangan kesejahteraan masyarakat (*welfare*), pembangunan manusia (*human development*) dan pengurangan kemiskinan (*poverty reduction*) (M.Alhudhori, 2018).

Dengan berbagai kebijakan dan program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan, angka kemiskinan Indonesia berhasil diturunkan menjadi 9,82 persen pada bulan Maret dan 9,66 persen pada September 2018. Namun di beberapa provinsi angka kemiskinan masih cukup tinggi yaitu di atas 15 persen pada Maret 2018, seperti di Provinsi Papua (27,74 persen), Papua Barat (23,01 persen), Nusa Tenggara Timur/ NTT (21,35 persen), Maluku (18,12 persen), Gorontalo (16,81 persen), Aceh (15,97 persen) dan Bengkulu (15,43 persen). Berikut grafik persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 2011-2018:



Grafik Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2011-2018. Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019.

Secara garis besar, tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2011-2018 mengalami penurunan, namun penurunan tersebut tidak terjadi secara signifikan seperti yang terlihat pada gambar 1. Permasalahan

strategis pada pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak jauh berbeda dengan permasalahan pada tingkat nasional yakni masih tingginya angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada peringkat tiga tertinggi di Indonesia setelah Papua Barat dan Papua. Kondisi kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2011-2018 mengalami penurunan. Namun demikian persentase tersebut masih berada di atas 20 persen atau berada di atas nasional sebesar 10,12 persen, sehingga masalah kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih perlu mendapat perhatian.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu syarat tercapainya pembangunan ekonomi, namun yang perlu diperhatikan tidak hanya angka statistik yang menggambarkan laju pertumbuhan, namun lebih kepada siapa yang menciptakan pertumbuhan ekonomi tersebut, apakah hanya segelintir orang atau sebagian besar masyarakat. Jika hanya segelintir orang yang menikmati maka pertumbuhan ekonomi tidak mampu mereduksi kemiskinan dan memperkecil ketimpangan, sebaliknya jika sebagian besar turut berpartisipasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi maka kemiskinan dapat direduksi dan *gap* antara orang kaya dan orang miskin dapat diperkecil (Nurul, 2015). Salah satu strategi/upaya pengentasan kemiskinan adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan SDM dapat dilakukan dengan perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan dan gizi) merupakan strategi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan (Subandi, 2012).

Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar. Masalah kependudukan yang dimaksudkan adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat tinggi di suatu negara berkembang. Pertumbuhan penduduk ini akan menimbulkan berbagai masalah dan hambatan bagi upaya-upaya pembangunan yang dilakukan karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut akan menyebabkan cepatnya laju pertambahan jumlah angkatan kerja, sedangkan kemampuan negara sedang berkembang termaksud Indonesia dalam menciptakan kesempatan kerja baru sangatlah terbatas. Pertumbuhan penduduk, kualitas sumberdaya manusia yang rendah, dan sempitnya kesempatan kerja merupakan akar permasalahan kemiskinan (Lincoln, 2016). Pengangguran merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh negara berkembang salah satunya Indonesia. Pengangguran terjadi karena pertumbuhan angkatan tenaga kerja lebih tinggi dari pertumbuhan lapangan pekerjaan yang ada. Dalam sudut pandang makro ekonomi, pengangguran yang tinggi merupakan masalah bagi suatu perekonomian. Pengangguran yang dialami sebagian masyarakat inilah yang membuat sulitnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu gambaran dampak dari tingginya tingkat pengangguran adalah akan banyaknya sumber daya yang terbuang percuma dan pendapatan masyarakat menjadi berkurang bahkan tidak ada sama

sekali. Secara teori jika masyarakat menganggur berarti tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan, karena tidak adanya penghasilan yang dimiliki sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup, sehingga berpengaruh terhadap kemiskinan (Windra, 2016). Faktor-faktor pembangunan ekonomi yang telah dijelaskan di atas, menjadi perhatian penting bagi masyarakat dan pemerintah. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat dan mempengaruhi pemerintah dalam pengambilan kebijakan yang tepat dalam pengentasan kemiskinan di setiap daerah.

B. KAJIAN PUSTAKA

Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan standar hidup minimum. Kemiskinan dapat disebabkan karena adanya kelangkaan pemenuhan kebutuhan hidup dasar seperti, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan (Kuncoro, 2010). Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata, seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Kemiskinan ini merupakan masalah sosial yang sudah sangat global.

Tinggi rendahnya kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor yaitu tingkat pendapatan nasional rata-rata dan lebar sempitnya kesenjangan distribusi pendapatan. Setinggi apapun pendapatan nasional perkapita suatu negara, selama distribusi pendapatannya tidak merata, maka tingkat kemiskinan di suatu negara tersebut pasti akan memburuk (Todaro, 2009).

Sedangkan secara terminologis, banyak ulama yang mengemukakan makna terminologis tentang faqir (miskin), salah satunya pendapat Abi Abdullah al-Qurtubi ketika menginterpretasikan QS at-Taubah (9) ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Al-Ghazali dalam mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ketidakmampuan untuk memenuhi apa yang tidak dibutuhkan bukanlah

kemiskinan. Jika barang yang dibutuhkan tersedia dan terjangkau oleh seseorang, maka dia tidak akan diperlakukan sebagai orang miskin (Nurul, 2015).

Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto. Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk peningkatan ekonomi yang berkelanjutan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. PDRB untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau local (Kuncoro, 2010). Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung pada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor produksi menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Sedangkan menurut BPS produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi (Kuncoro, 2010).

Pemahaman tentang konsep pembangunan ekonomi Islam terdapat pada Q.S, al-Mulk [67]: 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

Pertumbuhan ekonomi dalam Islam, bukan hanya dalam persoalan peningkatan ekonomi semata melainkan terkait kemajuan sisi materi dan spiritual manusia. Dilihat dari tujuan pokoknya, Islam tidak melihat pertumbuhan kekayaan semata tetapi lebih kepada distribusi kekayaan yang adil (Capra, 2002). Selain itu pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam, bukan sekedar terkait dengan peningkatan terhadap barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan *ukhrawi*. Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari sisi pencapaian materi semata atau hasil dari kuantitas, namun juga ditinjau dari sisi perbaikan kehidupan agama, sosial dan kemasyarakatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi justru memicu terjadinya keterbelakangan, kekacauan dan jauh dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, maka dipastikan pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan ekonomi (Beik, 2016).

Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memberikan sebuah konsep teori dalam ilmu pembangunan, yaitu konsep Ekonomi Pembangunan Syariah. Pada pendekatan konsep ini bahwa suatu pembangunan sangat bergantung dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu bangsa (Beik, 2016). Pembangunan manusia merupakan modal awal bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia harus diarahkan dengan baik, supaya menghasilkan tujuan yang diinginkan. Negeri yang kaya akan sumber daya alam, tidak secara otomatis memberikan kemakmuran bagi masyarakatnya, jika sumber daya manusianya tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Sebaliknya, sebuah negeri yang miskin akan sumber daya alam, namun memiliki kemampuan yang memadai, akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan negeri yang kaya akan sumber daya alam (Beik, 2016).

Pilar pembangunan manusia dalam Islam adalah *istishlah* atau kebaikan/kemaslahatan bagi manusia. Al-Qur'an secara eksplisit menjelaskan akan larangan untuk membuat kerusakan dimuka bumi, sehingga setiap kebijakan yang diputuskan oleh manusia harus memperhatikan aspek kemaslahatan. Semua kebijakan terhadap pembangunan manusia membawa kebaikan bagi kualitas hidup manusia maka hal tersebut baik untuk dilakukan dan berhak mendapatkan pahala karena telah menjalankan ketaatan terhadap perintah Allah SWT sedangkan sebaliknya jika kebijakan yang dibuat dapat merusak kualitas hidup manusia maka hal tersebut haram dari sisi aturan dan dosa jika tetap dilakukan (Beik, 2016).

Pada akhirnya, pembangunan kualitas manusia dengan menitikberatkan pada pembangunan keilmuan dan keimanan mampu menghasilkan generasi baru yang cerdas berilmu dan berkemajuan dan memiliki spirit keimanan dan tauhid kepada Allah SWT. Sehingga Islam hadir pada setiap pola pikir masyarakat, pada setiap pengambilan keputusan, serta pada segenap lini kehidupan di masyarakat. Implikasi lebih jauh dari hal tersebut adalah terciptanya lingkungan serta kehidupan sosial-masyarakat yang baik dan beradab (Beik, 2016).

Penduduk dalam Perspektif Ekonomi Islam

Lembaga BPS dalam Statistik Indonesia (2013) menjabarkan penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Sedangkan menurut Said yang dimaksud dengan penduduk adalah jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi (Said, 2012).

Bagi negara-negara berkembang keadaan perkembangan penduduk yang cepat justru akan menghambat perkembangan ekonomi. Karena akan selalu ada perlombaan antara tingkat perkembangan output dengan tingkat perkembangan penduduk, yang akhirnya akan dimenangkan oleh perkembangan penduduk. Jadi, karena penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, maka paling tidak terdapat kesulitan memperoleh kesempatan kerja. Jika mereka tidak memperoleh pekerjaan atau menganggur, maka justru akan menekan standar hidup bangsanya menjadi lebih rendah (Said, 2012).

Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras dan produktif, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah SWT akan memberi balasan yang setimpal sesuai dengan amal/kerja (Said, 2012). Allah SWT berfirman dalam QS. an-Nahl (16) ayat 97:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Sukirno, pengangguran biasanya dibedakan atas empat jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain (Said, 2012):

- 1) Pengangguran friksional, yaitu pengangguran normal yang terjadi jika ada 2-3% maka dianggap sudah mencapai kesempatan kerja penuh. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik;
- 2) Pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang terjadi karena merosotnya harga komoditas dari naik turunnya siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah dari pada penawaran tenaga kerja;
- 3) Pengangguran struktural, yaitu pengangguran karena kemerosotan beberapa faktor produksi sehingga kegiatan produksi menurun dan pekerja diberhentikan;
- 4) Pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang terjadi karena tenaga manusia digantikan oleh mesin industri.

Menurut Yusuf Qardawi (2002) pengangguran dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Pengangguran *jabariyyah* (terpaksa), yaitu suatu pengangguran yang seseorang tidak mempunyai hak sedikitpun memilih status ini dan terpaksa menerimanya. Pengangguran seperti ini umumnya terjadi, karena seseorang tidak mempunyai keterampilan sedikitpun.
- 2) Pengangguran *khiyariyyah*, yaitu seseorang yang memilih untuk menganggur, padahal pada dasarnya adalah orang yang mampu untuk bekerja, namun pada kenyataannya memilih untuk berpangku tangan dan bermalas-malasan, sehingga menjadi beban bagi orang lain. Memilih menganggur dengan potensi yang ada daripada harus bekerja.

C. METODE PENELITIAN

Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua biasanya dipublikasikan sebuah lembaga pengumpul data dan sudah siap diolah. Data yang digunakan yaitu mengenai Kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka tahun 2011-2018 yang diperoleh dari BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BAPPENAS.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua data mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), IPM, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka pada 21 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2011-2018.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mengenai PDRB, IPM, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka pada 21 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2011-2018. Terdapat 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur namun sampel dalam penelitian ini menggunakan 21 Kabupaten/Kota karena terdapat kabupaten yang merupakan wilayah pemekaran pada tahun 2015 yaitu Kabupaten Malaka, sehingga tidak terdapat data tahun 2011-2014.

Metode Analisis Data

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini maka metode penelitian yang digunakan merupakan metode analisis kuantitatif, dimana data yang diteliti berbentuk angka dan penghitungannya menggunakan software Eviews 9. Selanjutnya untuk memperoleh parameter dari pengaruh perubahan antar

variabel dalam penelitian ini akan dilakukan melalui pendekatan panel VAR atau VECM. Pendekatan panel VAR atau VECM digunakan untuk melihat intensitas dan *speed of adjustment* atau respon dari masing-masing variable dalam penelitian. Secara teknis dalam ekonometrika terdapat beberapa kesamaan dalam estimasi panel VAR atau VECM dengan model VAR biasa. Seluruh variabel dalam model panel VAR dapat menjadi variabel endogen seperti dalam model VAR (Canova, 2013).

Pendekatan estimasi VECM dalam data panel dapat dilakukan dengan menggunakan *framework* berbasis *likelihood* untuk analisis kointegrasi pada *Vector Error Correction Model* dengan data panel lengkap. Secara garis besar pemodelan PVECM dapat memberikan manfaat dalam bentuk (Badriyah, 2014):

1. *Impule Response Function* (IRF), melacak respon saat ini dan masa depan dari setiap variabel akibat perubahan atau *shock* suatu variabel tertentu.
2. *Forecast Error Variance Decomposition* (FEVDs), prediksi kontribusi persentase varian setiap variabel terhadap perubahan atau *shock* suatu variabel tertentu.

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Pengangguran Terbuka yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik dan BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dalam kurun waktu 2011-2018.

Berdasarkan hasil uji statistik dengan analisis deskriptif dalam penelitian ini maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

	Kemiskinan	PDRB	IPM	JP	TPT
Mean	50.07720	10469.96	63.92470	236130.4	3.176905
Median	43.85000	9057.800	62.90000	244599.5	2.795000
Maximum	144.0000	37237.39	78.84000	465970.0	14.25000
Minimum	16.00000	2051.160	52.51000	63721.00	0.250000
Std. Dev	27.58992	5716.601	4.937265	100943.6	2.374158
Skewness	1.246375	3.083283	0.839989	0.232502	2.595891
Kurtosis	4.463231	12.92811	4.381229	2.439733	11.26234

Variabel kemiskinan pada tabel di atas memiliki nilai maksimum sebesar 144,0000 atau 144,000 orang yaitu pada tahun 2015 di Kabupaten Timur Tengah Selatan sedangkan pada tingkat nasional kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi adalah Kab. Bogor sebesar 415,020 orang pada tahun 2018 (BAPPENAS, 2019). Nilai minimum sebesar 16,00000 atau 16,000 orang pada tahun 2011 di Kabupaten Nagekeo dan pada tingkat nasional Kab. Tana Tidung sebagai wilayah yang memiliki jumlah penduduk miskin terendah sebesar 1,340 orang pada tahun 2018 (BAPPENAS, 2019). Variabel PDRB pada tabel di atas memiliki nilai maksimum sebesar 37237,39 atau Rp37.237.390 yaitu pada tahun 2018 di Kota Kupang sedangkan pada tingkat nasional Kab/Kota dengan nilai PDRB tertinggi adalah Kota Jakarta Pusat sebesar Rp458.885.360 Nilai minimum sebesar 2051.160 atau Rp2.051.160 pada tahun 2017 di Kabupaten Sumba Tengah dan Kab/Kota dengan nilai PDRB terendah yaitu Kab. Pegunungan Arfak sebesar Rp4.429.790 pada tahun 2018 (BAPPENAS, 2019).

Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada di atas memiliki nilai maksimum sebesar 78,84000 atau 79 persen yaitu pada tahun 2018 di Kota Kupang sedangkan tingkat nasional Kab/Kota yang memiliki IPM tertinggi yaitu Kota Yogyakarta sebesar 86,11 persen pada tahun 2018 (BAPPENAS, 2019). Nilai minimum sebesar 52,51000 atau 53 persen pada tahun 2014 di Kabupaten Sabu Raijua dan tingkat nasional Kab. Nduga merupakan daerah yang memiliki tingkat IPM terendah sebesar 29,42 persen pada tahun 2018 (BAPPENAS, 2019). Variabel Jumlah Penduduk pada tabel di atas memiliki nilai maksimum sebesar 465970,0 atau 465,970 orang yaitu pada tahun 2018 di Kabupaten Timur Tengah Selatan sedangkan pada tingkat nasional Kab/Kota dengan jumlah penduduk tertinggi yaitu Kab. Bogor sebesar 5,715,000 orang pada tahun 2018 (BAPPENAS, 2019). Nilai minimum sebesar 63721,00 atau 63,721 orang pada tahun 2011 di Kabupaten Sumba Tengah dan Kab/Kota yang memiliki jumlah penduduk terendah yaitu Kab. Tamberau sebesar 13,785 orang pada tahun 2018 (BAPPENAS, 2019).

Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka pada tabel di atas memiliki nilai maksimum sebesar 14,25000 atau 14 persen yaitu pada tahun 2015 di Kota Kupang sedangkan pada tahun 2018 Kab/Kota dengan persentase tingkat pengangguran terbuka tertinggi yaitu Kab. Serang sebesar 12,77 (BAPPENAS, 2019). Nilai minimum sebesar 0,250000 atau 0,25 persen pada tahun 2014 di Kabupaten Sumba Tengah dan Kab. Bener Meriah sebagai kabupaten yang memiliki persentase tingkat pengangguran terbuka terendah sebesar 1,07 persen pada tahun 2018 (BAPPENAS, 2019).

2. Uji Akar Unit (Unit Root Test)

Pengujian masing-masing variabel dilakukan dengan menggunakan metode Levin, Lin & Chi t, Augment Dickey Fuller (ADF), dan Philip Peron. Jika probabilitas dari ketiga test tersebut lebih kecil dari tingkat $\alpha=5\%$ (0,05), maka data dikatakan stasioner pada setiap variabel dengan derajat level maupun *first different*, begitupula sebaliknya jika probabilitas dari ketiga test tersebut lebih besar dari tingkat $\alpha=5\%$ (0,05) maka data dikatakan tidak stasioner.

Adapun uji stasioneritas pada variabel kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, IPM, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Uji Akar Unit (unit root test)

Metode	Kemiskinan	D(kemiskinan)	LnPDRB	D(lnPDRB)	IPM	D(IPM)	JP	D(JP)	TPT	D(TPT)
Levin, Lin & Chu t	0.9988	0.0000*	10000	0.0000*	0.4487	0.0000*	0.7734	0.0000*	0.0166*	0.0000*
ADF - Fisher Chi-Square	0.4025	0.0000*	0.9958	0.0000*	0.8705	0.0027*	0.9792	0.0000*	0.3284	0.0037*
PP - Fisher Chi-Square	0.3051	0.0000*	0.5253	0.0000*	0.9489	0.0015*	0.8722	0.0000*	0.8124	0.0000*

Ket*) Signifikan pada taraf uji 5% berdasarkan distribusi *prob. Chi Square*

Hasil uji akar unit atau *unit root test* menunjukkan bahwa variabel dalam penelitian yaitu kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, IPM, dan tingkat pengangguran terbuka tidak stasioner pada tingkat level atau H_0 ditolak karena nilai Levin, Lin & Chi t, Augment Dickey Fuller (ADF), dan Philip Peron $>$ *critical value* ($\alpha=5\%$). Akan tetapi semua variabel tersebut stasioner pada *first different* atau H_0 diterima karena nilai Levin, Lin & Chi t, Augment Dickey Fuller (ADF), dan Philip Peron $<$ *critical value* ($\alpha=5\%$) dengan taraf nyata $\alpha=5\%$ (0,05) seperti pada tabel 4.2. hal ini berarti salah satu syarat metode PVECM terpenuhi.

3. Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi dilakukan setelah uji stasioneritas dan telah berintegrasi dengan derajat yang sama. Uji kointegrasi dilakukan dengan menguji stasioneritas dari residual agar terjadi suatu penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang antar variabel. Penelitian ini dalam melakukan uji kointegrasi menggunakan *Kao Residual Cointegration Test*. Berikut hasil uji kointegrasi dengan menggunakan uji *Kao Residual Cointegration* sebagai berikut:

	t-Statistic	Prob.
ADF	-4.462179	0.0000
Residual variance	49.93603	
HAC variance	25.52051	

Hasil uji kointegrasi dengan *Kao Residual Cointegration Test* menunjukkan adanya kointegrasi antar variabel penelitian dengan *t-statistik* sebesar -4.462179 dan *p-value* sebesar 0,0000 (*p-value* > 0,05) atau H_0 diterima karena nilai $ADF < critical\ value$ ($\alpha=5\%$) sehingga PVECM dipilih sebagai alat estimasi.

4. Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan *Error Correction Model* (ECM). Pendekatan ECM digunakan untuk menjelaskan parameter jangka panjang dan jangka pendek. Bentuk persamaan ECM untuk estimasi jangka panjang sebagai berikut:

$$KEMISKINAN_{it} = \alpha_1 PDRB_{it} + \alpha_2 IPM_{it} + \alpha_3 JP_{it} + \alpha_4 TPT_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

- KEMISKINAN_{it} : Kemiskinan
- PDRB_{it} : Produk Domestik Regional Bruto
- IPM_{it} : Indeks Pembangunan Manusia
- JP_{it} : Jumlah Penduduk
- TPT_{it} : Tingkat Pengangguran Terbuka
- $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4$: Koefisien Jangka Panjang

Bentuk persamaan ECM untuk estimasi jangka pendek adalah sebagai berikut:

$$DKEMISKINAN_{it} = \alpha_1 DPDRB_{it} + \alpha_2 DIPM_{it} + \alpha_3 DJP_{it} + \alpha_4 DTPT_{it} + ECT (-1)$$

Keterangan:

- KEMISKINAN_{it} : Kemiskinan
- PDRB_{it} : Produk Domestik Regional Bruto
- IPM_{it} : Indeks Pembangunan Manusia
- JP_{it} : Jumlah Penduduk
- TPT_{it} : Tingkat Pengangguran Terbuka
- $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4$: Koefisien Jangka Pendek

ECT: *Error Correction Term*

Kriteria pengujian *Error Correction Model* (ECM) sebagai berikut:

- H_0 : Signifikan
- H_a : Tidak Signifikan
- Tingkat signifikansi 95% atau $\alpha = 5\%$
- Statistik uji: nilai probabilitas F statistik (F hitung)
- Daerah kritis: H_0 ditolak jika nilai probabilitas $>$ *critical value* ($\alpha = 5\%$)
- Kesimpulan: H_0 diterima karena nilai probabilitas $<$ *critical value* ($\alpha = 5\%$)

a. Pengujian hipotesis pertama yang dilakukan dengan model ECM jangka panjang, hasil regresi sebagai berikut:

Tabel Hasil Estimasi Model ECM Jangka Panjang

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LNPDRB	-5.622743	3.850026	-1.460443	0.1461
IPM	-1.802331	0.280568	-6.423867	0.0000
JP	0.000241	1.20E-05	20.02411	0.0000
TPT	-1.555441	0.572271	-2.718015	0.0073
C	164.9402	31.36043	5.259502	0.0000
R-squared	0.723324			
Adjusted R-squared	0.716534			
F-statistic	106.5342			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah, Eviews 9, 2020

$$\text{KEMISKINAN}_{it} = 164,9402_C - 5,622743_LNPDRB - 1,802331_IPM + 0,000241_JP - 1,555441_TPT$$

Dari persamaan yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 164,9402 artinya ketika nilai pertumbuhan ekonomi (PDRB), IPM, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka = 0, maka

besarnya tingkat kemiskinan sebesar 164,9402. Adapun pengukuran menggunakan tingkat signifikansi 5%, dari tabel di atas dapat dianalisis bahwa variabel IPM, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka signifikan, sedangkan variabel PDRB tidak signifikan secara statistik. Kemudian dari hasil uji tersebut diketahui nilai koefisien PDRB sebesar -5,622743, di mana ketika nilai koefisien bernilai negatif artinya PDRB bernilai negatif terhadap kemiskinan. Ketika PDRB naik 1 persen maka akan terjadi penurunan pada angka kemiskinan sebesar 5,622743, sebaliknya ketika PDRB turun 1 persen maka akan menaikkan angka kemiskinan sebesar 5,622743.

Variabel IPM dari hasil uji tersebut diketahui nilai koefisien sebesar -1,802331, di mana ketika nilai koefisien bernilai negatif artinya IPM bernilai negatif terhadap kemiskinan. Artinya, ketika IPM naik 1 persen maka akan terjadi penurunan pada angka kemiskinan sebesar 1,802331, sebaliknya ketika IPM turun 1 persen maka akan menaikkan angka kemiskinan sebesar 1,802331. Variabel jumlah penduduk nilai koefisien sebesar 0,000241 dimana karena nilai koefisien positif maka pengaruh jumlah penduduk dan kemiskinan adalah positif. Artinya, ketika jumlah penduduk meningkat sebesar 1 persen maka akan menaikkan tingkat kemiskinan sebesar 0,000241, begitupula sebaliknya ketika terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 1 persen maka akan diikuti oleh menurunnya angka kemiskinan sebesar 0,000241. Diketahui nilai koefisien variabel tingkat pengangguran terbuka sebesar -1,555441 dimana karena nilainya koefisien negatif maka pengaruh tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan adalah negatif. Artinya, ketika tingkat pengangguran terbuka meningkat sebesar 1 persen maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1,555441, begitupula sebaliknya ketika terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1 persen maka akan diikuti oleh meningkatnya angka kemiskinan sebesar 1,555441.

b. Adapun hasil estimasi model ECM dalam jangka pendek ditunjukkan oleh hasil di bawah ini:

Tabel Hasil Estimasi Model ECM Jangka Pendek

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(LNPDRB)	-0.339325	2.267712	-0.149633	0.8813
D(IPM)	0.195309	0.210229	0.929030	0.3545
D(JP)	0.000101	2.93E-05	3.431372	0.0008
D(TPT)	0.041693	0.314692	0.132490	0.8948
ECT(-1)	-0.134603	0.040181	-3.349943	0.0010
C	0.907044	0.584887	1.550801	0.1232

R-squared	0.132664
Adjusted R-squared	0.101908
F-statistic	4.313363
Prob(F-statistic)	0.001108

Sumber: Data diolah, Eviews 9, 2020.

$$DKEMISKINAN_{it} = 0,907044_C - 0,339325_DLNPDRB + 0,195309_DIPM + 0,000101_DJP + 0,041693_DTPT$$

Dari persamaan yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 0,907044 artinya ketika nilai PDRB, IPM, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka = 0, maka besarnya tingkat kemiskinan sebesar 0,907044. Adapun pengukuran menggunakan tingkat signifikansi 5%, dari tabel di atas dapat dianalisis bahwa variabel PDRB, IPM, dan tingkat pengangguran terbuka tidak signifikan, sedangkan variabel jumlah penduduk signifikan secara statistik. Kemudian dari hasil uji tersebut diketahui nilai koefisien PDRB sebesar -0,339325, di mana ketika nilai koefisien bernilai negatif artinya PDRB bernilai negatif terhadap kemiskinan. Ketika PDRB naik 1 persen maka akan terjadi penurunan pada angka kemiskinan sebesar 0,339325, sebaliknya ketika PDRB turun 1 persen maka akan menaikkan angka kemiskinan sebesar 0,339325.

Variabel IPM dari hasil uji tersebut diketahui nilai koefisien sebesar 0,195309, di mana ketika nilai koefisien bernilai positif artinya IPM bernilai positif terhadap kemiskinan. Artinya, ketika IPM naik 1 persen maka akan diikuti pada peningkatan angka kemiskinan sebesar 0,195309, sebaliknya ketika IPM turun 1 persen maka akan menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,195309. Diketahui nilai koefisien variabel jumlah penduduk sebesar 0,000101 dimana karena nilainya koefisien positif maka pengaruh jumlah penduduk dan kemiskinan adalah positif. Artinya, ketika jumlah penduduk meningkat sebesar 1 persen maka akan menaikkan tingkat kemiskinan sebesar 0,000101, begitupula sebaliknya ketika terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 1 persen maka akan diikuti oleh menurunnya angka kemiskinan sebesar 0,000101. Kemudian dari hasil uji tersebut diketahui nilai koefisien sebesar tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,041693, di mana ketika nilai koefisien bernilai positif berarti tingkat pengangguran terbuka bernilai positif terhadap kemiskinan. Artinya, ketika tingkat pengangguran terbuka naik 1 persen maka akan diikuti pada peningkatan angka kemiskinan sebesar 0,041693, sebaliknya ketika tingkat pengangguran terbuka turun 1 persen maka akan menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,041693.

Pembahasan

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil uji analisis yang telah dijelaskan di atas, diperoleh hasil bahwa dalam jangka pendek dan jangka panjang variabel PDRB berpengaruh negatif terhadap kemiskinan tetapi tidak signifikan. Artinya, apabila PDRB naik maka akan diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa PDRB mampu menjadi tolok ukur dalam mengentaskan kemiskinan pada suatu daerah. NTT merupakan provinsi yang memiliki nilai PDRB per kapita terendah se-Indonesia yaitu sebesar Rp12.276.000 sangat timpang dengan Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi yang memiliki PDRB per kapita tertinggi sebesar Rp165.863.000. Hal tersebut yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi NTT.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kenaikan pendapatan per kapita yang terjadi di wilayah KTI belum sepenuhnya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan penduduk khususnya kelompok miskin, karena pertumbuhan ekonomi di wilayah KTI hanya melihat laju pertumbuhan tanpa memperhatikan penurunan tingkat kemiskinan dengan distribusi pendapatan yang merata. Pembangunan yang sudah berlangsung selama ini belum menyentuh sektor-sektor yang berkaitan dengan kelompok miskin. Menurut Balisacan (2003), strategi pertumbuhan yang berpihak pada orang miskin (*pro poor growth*) dapat dilakukan dengan menerapkan kebijakan-kebijakan di bidang infrastruktur, pertanian, pengembangan modal manusia, dan akses teknologi. Artinya, distribusi pendapatan masih kurang merata, kualitas SDM masih rendah, dan ketersediaan infrastruktur masih terbatas (BAPPENAS, 2013).

Islam memandang pemerataan, karena pertumbuhan ekonomi tidak menggambarkan kesejahteraan secara menyeluruh, terlebih apabila pendapatan dan faktor produksi banyak terpusat bagi sekelompok kecil masyarakat. Karena itu, teknik dan pendekatan baru yang harus dilakukan dalam pembangunan menurut perspektif ekonomi Islam, adalah bahwa kita harus meninggalkan penggunaan model-model pertumbuhan agregat yang lebih menekankan maksimalisasi tingkat pertumbuhan sebagai satu-satunya indeks perencanaan pembangunan. Karena itu, pertumbuhan ekonomi dan perkapita yang tinggi, bukan menjadi tujuan utama. Sebab apalah artinya perkapita tinggi, tapi berbeda sama sekali dengan kondisi riil, kemiskinan menggurita dan kesenjangan tetap menganga (Naf'an, 2014).

Pengaruh IPM terhadap Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil uji analisis yang telah dijelaskan di atas, diperoleh hasil bahwa dalam jangka pendek variabel IPM berpengaruh positif terhadap kemiskinan tetapi tidak signifikan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Alhudori (2017) bahwa peningkatan IPM tidak dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia di NTT yang ditunjukkan melalui nilai IPM relatif meningkat yaitu sebesar 63,73 tahun 2017 dibandingkan tahun 2018 sebesar 64,39 namun masih berada di bawah IPM nasional sebesar 71,39. Rendahnya nilai IPM di NTT sejalan dengan rendahnya tingkat kemiskinan di provinsi ini. Kondisi ini tentunya bertolak belakang dengan tingginya nilai pendapatan perkapita Provinsi NTT, yang menunjukkan bahwa pembangunan di wilayah Provinsi NTT masih berjalan eksklusif dan tidak merata.

Dalam perspektif ekonomi Islam ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu; sumber daya yang dapat dikelola, sumber daya manusia (*human resources*), wirausaha, dan teknologi. Pertumbuhan dan pembangunan dalam ekonomi Islam ditekankan pada perhatian yang sangat serius pada pengembangan sumberdaya manusia sekaligus pemberdayaan alam untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Hal ini tidak hanya diwujudkan dalam keberhasilan pemenuhan kebutuhan material saja, namun juga kebutuhan dan persiapan menyongsong kehidupan akhirat (Naf'an, 2014).

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kekayaan sumber daya alam yang baik namun kualitas sumber daya manusia sangat rendah. Sumber daya manusia merupakan kekuatan terbesar dalam pengelolaan seluruh *resources* yang ada di muka bumi, karena pada dasarnya seluruh ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini sengaja diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Dalam pembangunan ekonomi Islam kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh besar karena sumber daya alam yang ada sudah diciptakan oleh Allah SWT dan manusia dituntut untuk meningkatkan kualitasnya sehingga dapat berproduktifitas dengan baik. Komponen pembangunan manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak perlu ditingkatkan agar berdampak pada produktifitas masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga dapat menurunkan jumlah penduduk miskin.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pada uji analisis yang telah dijelaskan, diperoleh hasil bahwa dalam jangka pendek dan jangka panjang variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, apabila jumlah penduduk naik maka akan diikuti oleh meningkatnya kemiskinan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah penduduk mampu menjadi tolok ukur dalam mengentaskan kemiskinan pada suatu daerah.

Penduduk Provinsi NTT berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 adalah sebanyak 5.371.519 jiwa yang terdiri atas 2.660.613 laki-laki dan 2.710.906 perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2018 adalah 98 yang berarti dari 100 perempuan hanya terdapat 98 laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2018 adalah 1,67 persen (BPS, 2019).

Dengan banyaknya penduduk yang berproduktifitas serta adanya peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja, diharapkan menjadi modal dalam memperlancar pembangunan suatu daerah yang berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan di suatu daerah. Peningkatan pembangunan suatu daerah diharapkan terjadi secara adil dan merata sehingga memperkecil ketimpangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. An-Najm ayat 39:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia memperoleh hasil dari apa yang telah diusahakannya. Untuk itu produktifitas seseorang sangat penting karena berdampak pada hasil/output yang akan diperolehnya. Menurut Abdul Sami' Mishri (2006) bekerja tidak hanya sekedar sebagai pendorong manusia untuk mempertahankan eksistensinya dalam kehidupan, namun merupakan asas segala sesuatu. Bekerja merupakan fondasi dasar untuk mendekati diri kepada Allah. Untuk itu, al-Quran senantiasa mengiringi lafal ‘amal dengan lafal iman (al-Mishri, 2018). Bekerja merupakan asas kehidupan Islam, Islam sangat mendorong setiap muslim untuk bekerja secara sungguh-sungguh dengan etos kerja tinggi, bekerja secara optimal dengan menghilangkan segala hambatan dan tantangan.

Pengaruh TPT terhadap Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil uji analisis yang telah dijelaskan di atas, diperoleh bahwa dalam jangka panjang variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noor Zuhdiyaty & David Kaluge (2017) bahwa tingkat

pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Dalam pandangan Islam solusi pengangguran ditujukan kepada kedua belah pihak; pertama kepada pemerintah dan kedua kepada individunya sendiri. Menurut Islam, untuk dapat terciptanya lapangan kerja yang luas dan tenaga kerja yang siap pakai, maka kebijakan-kebijakan pemerintah harus berorientasi kepada kepentingan rakyat. Tidak hanya berpihak kepada kelompok tertentu yang hanya akan memperoleh keuntungan sepihak saja (Nafis, 2013). Kaum muslim harus memiliki etos kerja yang tinggi untuk membebaskan dirinya dari pengangguran. Dalam Al-Qur'an surat At-Tawbah: 105 juga Allah SWT telah menganjurkan untuk bekerja, ayat tersebut sebagai berikut:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Maksud perintah Allah swt. supaya manusia bekerja, namun tidak boleh lupa bahwa apapun yang dikerjakan akan dilihat oleh Allah dan Rasul-Nya, serta orang-orang mukmin yang bermakna penyaksian dan kelak akan diperhadapkan kembali kepada Allah swt. mengenai apa yang telah dikerjakan (Aedi, 2014). Ayat tersebut bermakna penting atas jawaban manusia terhadap pekerjaan atau amal yang dilaksanakannya.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

- a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek dan jangka panjang pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif. Hal tersebut disebabkan karena tidak meratanya pertumbuhan ekonomi yang terjadi disetiap daerah sehingga menyebabkan ketimpangan. Padahal di dalam pembangunan ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi yang terjadi harus disertai dengan pemerataan sehingga tidak terjadi *gap* antar kaya dan miskin serta diharapkan distribusi pendapatan yang merata.
- b. Berdasarkan pengujian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa IPM dalam jangka pendek IPM berpengaruh positif sedangkan dalam jangka panjang IPM berpengaruh negatif signifikan. Kualitas sumber daya manusia di kabupaten/kota Provinsi NTT masih berada di bawah rata-rata nasional. Dalam Islam kualitas sumber daya manusia harus didukung dengan kemampuan literasi Islam yang baik, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT meliputi pemahaman nilai-nilai tauhid *uluhiyah* dan tauhid *rububiyah* sehingga menghasilkan manusia yang beradab, berkepribadian dan berkemajuan.
- c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Pertumbuhan penduduk yang seimbang menurut Islam yaitu pertumbuhan yang memiliki keserasian antar kuantitas dan kualitas. Penduduk diharapkan

memiliki kualitas yang baik sehingga dapat berproduktifitas dan pertumbuhan jumlah penduduk yang terjadi mampu menurunkan angka kemiskinan.

- d. Berdasarkan uji analisis yang telah dilakukan dalam jangka panjang TPT berpengaruh negatif sedangkan dalam jangka pendek TPT berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Solusi pengangguran dalam Islam ditujukan kepada pihak pemerintah dan rakyatnya. Kebijakan pemerintah harus berpihak pada kepentingan rakyat dan rakyatpun diharapkan untuk berproduktifitas sehingga mampu merubah nasibnya.
- e. Secara simultan (bersama-sama) baik dalam jangka pendek maupun panjang variabel pertumbuhan ekonomi, IPM, jumlah penduduk dan TPT mempunyai pengaruh positif terhadap kemiskinan. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan nilai probabilitas F-statistik jangka pendek sebesar 0,001108 dan jangka panjang sebesar 0,000000.

2. Saran

- a. Agar pertumbuhan ekonomi dapat berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan diharapkan pemerintah dapat mengecilkan kesenjangan antar daerah yang terjadi. Tidak melulu fokus terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi diikuti dengan pemerataan antar daerah.
- b. Faktor kesehatan, pendidikan serta daya beli masyarakat yang merupakan indikator dalam IPM perlu ditingkatkan oleh pemerintah. Pemerintah juga dapat memberikan pelayanan di sektor pendidikan secara gratis khususnya bagi masyarakat miskin. Sehingga kualitas SDM lebih meningkat yang diharapkan dapat menurunkan jumlah penduduk miskin. Perhatian pemerintah terhadap kesehatan juga masih perlu ditingkatkan dengan pelayanan kesehatan gratis, memperbanyak puskesmas khususnya pada masyarakat desa miskin dan tertinggal.
- c. Pemerintah harus fokus pada penyediaan lapangan pekerjaan untuk masyarakat, dan memberikan layanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat untuk melakukan kehidupan yang lebih layak/merata untuk mencukupi kehidupan masing-masing.
- d. Pemerintah ke depan dapat lebih fokus pada peningkatan kapasitas tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja formal. Hal ini bisa dilakukan baik dengan penciptaan proyek padat karya sebagaimana yang dilakukan dana desa, ataupun mempermudah ijin investasi agar industrialisasi dapat berkembang di Provinsi NTT.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedy, Hasan., 2011, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Bandung: Alfabeta.
- al-Mishri, Abdul Sami'., 2006, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, penerjemah Dimyauddin Djuwaini, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky., 2017, Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam, *Jurnal Ekonomi Islam* vol. 8 No. 2.
- Arsyad, Lincolin., 2016, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badriyah, Siti., 2018, Pengaruh Belanja Daerah Terhadap PDRB Jawa Tengah Menggunakan *Panel Vector Error Correction Model (PVECM)*, *Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*.
- BAPPENAS., 2017, Prada Profil dan Analisis Daerah Provinsi: Nusa Tenggara Timur 2017.
- BAPPENAS., 2018, Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tertinggi, BAPPENAS: Jakarta.
- BPS., 2019, *Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Angka 2019*.
- Bukhari, As'ad., 2018, Islam dan Pembangunan Manusia di Era Globalisasi, *Jurnal Studi Islam* Vol. 5 No. 1.
- Canova F, Ciccarelli, M., 2013, *Panel Vector Autoregressive Models: A Survey. Advance in Econometrics*.
- Chapra, M. Umar., 2002, *Islam and Economic Challenge, Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Djojohadikusumo, Sumitro., 1994, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, PT Pustaka LP3ES Indonesia: Jakarta.
- Huda, Nurul., 2015, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Irfan Syauqi Beik & Laily Dwi Arsyianti., 2016, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kuncoro, Mudrajat., 2010, *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Michael P. Todaro & Stephen C. Smith., 2009, *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Naf'an., 2014, *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nafis, M. Cholil., 2011, *Kependudukan dalam Islam*, Mitra Abadi Press: Jakarta.
- Qardawi, Yusuf., *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Terj. Zikrul Hakim: Jakarta.
- R Said., 2012, *Pengantar Ilmu Kependudukan*, Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan sosial.

Subandi., 2012, *Ekonomi Pembangunan*, Bandung: Alfabeta.

Sukirno, Sadono *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suryawati C., Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.

Windra, Pan Budi Marwoto, Yudi Rafani., 2016, Analisis Pengaruh Inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Progresif Manajemen Bisnis (JIPMB)*, Vol 14 No. 2.